

AKUNTANSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA BANK SYARIAH

Nurul Fitri Ismayanti

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
Tulungagung
nurulv3i2s@gmail.com*

Abstract

This journal describes how the Islamic banks reporting and exposing their corporate social responsibility to the community in general and shareholders in particular. As we know, that every company, especially companies tbk., Must set aside part of its profits to social activities, which is better known as Corporate Social responsibility (CSR). CSR is intended to demonstrate corporate responsibility to the communities in which they operate. This CSR activity should be reported by the company to the public and shareholders, in the form of CSR report. However, in practice, there are still some companies that have not been compiled neatly the CSR report. Even in Islamic banks, only a few banks that have issued its CSR report. In this paper, the author will discuss how CSR report should be made, and disclosure.

Keywords: *Bank Syariah, CSR, Responsibility Accounting*

Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai bagaimana bank syariah melaporkan dan mengungkap tanggung jawab sosial perusahaan mereka kepada masyarakat pada umumnya dan para pemegang saham pada khususnya. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap perusahaan, terutama perusahaan tbk., wajib menyisihkan sebagian labanya untuk kegiatan sosial, yang lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). CSR dimaksudkan untuk menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar tempat perusahaan mereka beroperasi. Kegiatan CSR ini perlu dilaporkan oleh perusahaan kepada masyarakat dan pemegang saham, dalam bentuk Laporan CSR. Namun dalam prakteknya, masih ada beberapa perusahaan yang belum menyusun secara rapi laporan CSR tersebut. Bahkan pada bank

syariah, hanya beberapa bank saja yang sudah menerbitkan laporan CSR nya. Dalam jurnal ini, penulis akan membahas bagaimana seharusnya laporan CSR dibuat, dan pengungkapannya.

Kata Kunci: Bank Syariah, CSR, Akuntansi Pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Sejak disahkannya tanggungjawab sosial dan lingkungan atau yang disebut juga *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai kewajiban perseroan dalam Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada 20 Juli 2007 oleh DPR, banyak terjadi pro-kontra diantara kalangan pelaku usaha dengan pemerintah dan DPR. Terdapat beberapa alasan pelaku usaha menolak CSR, diantaranya yaitu: pertama, praktik CSR di dunia umumnya bersifat sukarela, sehingga akan aneh apabila Indonesia menjadikannya sebagai kewajiban perusahaan. Kedua, menjadikan CSR sebagai kewajiban, akan semakin membebani perusahaan, dan mengurangi laba perusahaan. Ketiga, dengan diwajibkannya CSR, dapat mengganggu kegiatan investasi di Indonesia, dan dapat menyebabkan mundurnya para investor asing.¹

Sementara itu, alasan DPR dan pemerintah menetapkan CSR sebagai kewajiban perusahaan, adalah karena perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya, tidak jarang menimbulkan dampak-dampak negatif yang merugikan masyarakat serta lingkungan. Contoh kasus yang pernah terjadi, dan sampai saat ini pun belum ada penyelesaian yang tuntas, adalah kasus lumpur panas PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo.²

Sejarah Perkembangan CSR

CSR muncul dan berkembang sejalan dengan interrelasi antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban masyarakat. Semakin tinggi peradaban masyarakat, khususnya dalam perkembangan ilmu, semakin tinggi tingkat

¹ Andreas Lako, 2011, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga), hal.2.

² *Ibid*, hal. 3.

kesadaran dan perhatian terhadap lingkungan, yang memunculkan tuntutan tanggungjawab perusahaan.

Batasan konsep CSR, mengalami perkembangan dalam sejarah keberadaannya. Mengingat, CSR salah satunya muncul dari tuntutan *stakeholders*, sebagai akibat dari eksistensi perusahaan, yang mengganggu keberadaan komunitas sekitarnya. Perkembangan CSR terbagi menjadi tiga periode, yaitu:

Perkembangan awal yang masih diwarnai konsep tradisional yaitu antara 1950-1960.

Perkembangan pertengahan antara tahun 1970-1980.

Perkembangan era tahun 1990-an sampai sekarang.³

Perkembangan Awal CSR Tahun 1950-1960-an

Perkembangan awal CSR masih dipahami secara sederhana. Menurut cara pandang tradisional, CSR lebih didasarkan pada aktifitas yang bersifat sosial. CSR mulai terlihat ramai dilakukan sejak tahun 1960-an, dimana secara global, masyarakat dunia baru saja pulih dari *excess* Perang Dunia I dan II, serta mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan. Konteks CSR saat itu, masih bias gender, mengingat pelaku bisnis dan manajer di Amerika saat itu masih didominasi kaum pria. Sehingga pada saat itu, dimensi CSR terhadap kaum wanita belum begitu tampak.

CSR masih didominasi dengan kegiatan sosial jangka pendek, dan hanya merupakan sikap murah hati pengusaha. Wujud pengakuan tanggungjawab sosial perusahaan ditunjukkan dengan upaya perusahaan, menggunakan metode efisiensi dalam penggunaan sumberdaya yang serba terbatas dalam rangka memproduksi barang dan jasa, menghasilkan barang dan jasa dengan harga terjangkau dan rasional, sesuai dengan daya beli masyarakat, selain menciptakan lapangan kerja, memberikan keuntungan bagi faktor-faktor produksi, serta distribusi pendapatan lewat pembayaran pajak. Semua hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab sosial perusahaan, meskipun masih dalam ranah motif ekonomi.

³ Nor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal.49.

Berdasarkan karakter tanggungjawab sosial pada era 1960-an, terdapat beberapa karakter pemicu tanggungjawab sosial pada masa itu, antara lain:

Tanggungjawab sosial muncul sebagai respon kesadaran etis dalam berbisnis, secara personal pemilik modal, sehingga tanggungjawab sosial merupakan bentuk sikap derma yang ditujukan pada masyarakat sekitar.

Wujud tanggungjawab sosial bersifat sosial dan insidental, yang tergantung pada kondisi kesadaran dan keinginan pemodal. Bentuk apa, kapan dan kepada siapa bantuan diberikan, sangat tergantung pada kemajuan sang pemilik modal.

Tipe kontrak pelaksanaan yang mendasari tanggungjawab sosial bersifat *stewardship principle*. Konsep tersebut mendudukan pelaku bisnis sebagai *steward* (wali) masyarakat, sehingga perlu mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.⁴

Perkembangan CSR Pertengahan Antara Tahun 1970-1980

Pada tahun 1970-an, terbit sebuah buku yang berjudul “The Limits to Growth” yang merupakan buku monumental dan ditulis oleh Club of Rome. Buku tersebut mengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa, bumi yang kita pijak mempunyai keterbatasan daya dukung. Sementara, manusia bertambah secara eksponensial, sehingga eksploitasi alam mesti dilakukan secara hati-hati supaya pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Pada tahun 1970-an juga terbentuk *Community for Development* (CED) yang merupakan gabungan kelompok perusahaan di Amerika, dan para peneliti. CED menyatakan bahwa, eksistensi perusahaan di tengah lingkungan masyarakat diikat oleh kontrak sosial. Substansi kontrak sosial tersebut mengalami perkembangan dan perubahan signifikan, yaitu pelaku bisnis dituntut untuk memikul tanggungjawab secara lebih luas kepada masyarakat. Perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, yang bukan hanya sekedar memproduksi dan memasok barang dan jasa bagi masyarakat.

Di tahun 1980-an, makin banyak perusahaan yang menggeser

⁴ *Ibid*, hal.51.

konsep tanggungjawab sosial dari basis *philantrophy*, ke arah yang lebih produktif lewat *Community Development* (CD). Intinya, kegiatan derma yang sebelumnya kental dengan pola derma sosial, bergeser ke arah pola pemberdayaan masyarakat, seperti: pengembangan kerjasama, memberikan ketrampilan, pembukaan akses pasar, dan sejenisnya. Secara garis besar, karakter CSR pada era 1970-an, antara lain:

Dimulainya berbagai kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat dan lingkungan sebagai sentral pertimbangan munculnya kegiatan.

Berorientasi bukan hanya ditujukan untuk derma.⁵

Perkembangan CSR Era Tahun 1990-an Sampai Sekaranag

Era 1990-an merupakan periode praktik tanggungjawab sosial yang diwarnai dengan beragam pendekatan, seperti: pendekatan integral, pendekatan *stakeholders*, maupun pendekatan *civil society*. *Community development* akhirnya menjadi satu aktifitas yang lintas pelaku sebagai konsekuensi keterlibatan berbagai pihak. Satu terobosan besar dari perkembangan CSR dikemukakan oleh John Elkington, yang dikenal dengan “Tripple Bottom Line”, yang terdapat dalam buku “Canibalts with Forks, the Tripple Bottom Line of Twentieth Century Business”. Konsep tersebut mengakui bahwa jika perusahaan ingin bertahan, maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan hanya profit yang dicari, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Profit, merupakan satu bentuk tanggungjawab yang harus dicapai perusahaan, dan profit merupakan orientasi utama perusahaan. Hal berkaitan dengan, peningkatan kesejahteraan personil perusahaan, peningkatan tingkat kesejahteraan pemilik, peningkatan kontribusi bagi masyarakat lewat pembayaran pajak, dan ekspansi usaha yang pastinya membutuhkan sumberdana, dimana hal tersebut bisa dilakukan apabila didukung dengan

⁵ *Ibid*, hal.55.

kemampuan menciptakan keuntungan (*profit*) perusahaan.

People, merupakan lingkungan masyarakat dimana perusahaan berada. Mereka adalah para pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Tanpa dukungan masyarakat sekitar, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Oleh karena itu, kemauan dan kemampuan perusahaan mendekati diri dengan masyarakat melalui CSR sangatlah penting.

Planet, merupakan lingkungan fisik perusahaan, dimana lingkungan merupakan tempat perusahaan menopang. Hubungan perusahaan dengan alam merupakan hubungan sebab-akibat, dimana kerusakan dan eksploitasi alam tanpa batas keseimbangan, cepat atau lambat akan menghancurkan perusahaan dan masyarakat.

Pengertian CSR

Keberhasilan suatu usaha, bukan hanya diukur dari keuntungan bisnis semata, melainkan juga dilihat dari tingkat kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Kepedulian terhadap aspek sosial dan lingkungan sangat penting bagi keberlanjutan suatu usaha, karena kedua aspek tersebut merupakan parameter untuk mengetahui dampak positif maupun negatif dari keberadaan perusahaan, sebagai entitas baru dalam komunitas lokal. Perusahaan terkadang merasa cukup dengan hanya mengandalkan ijin operasional baik dari pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten, namun mengabaikan ijin lokal dalam wujud kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Deskripsi diatas menjadi pengantar mengenai perubahan paradigma tanggungjawab sosial perusahaan, yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sebelumnya, perusahaan atau para pelaku bisnis hanya memandang CSR sebagai beban, bukan sebagai investasi strategis yang akan mendatangkan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang bagi perusahaan. Sedangkan saat ini, perusahaan semakin menyadari bahwa CSR bukan lagi beban, melainkan bagian dari investasi sosial, dimana

keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh profit (keuntungan), tetapi juga daya dukung planet (lingkungan alam) dan people (masyarakat) atau disebut tripple bottom-line performance.

Walaupun CSR sangat penting untuk diterapkan oleh para pelaku bisnis, namun wacana mengenai CSR kurang memiliki apresiasi yang tepat. Hal ini dipicu oleh kondisi, dimana: 1) masih belum adanya keseragaman dan batasan jelas mengenai CSR; 2) perusahaan bersikap oportunistis, terlebih CSR memerlukan biaya yang cukup besar dan belum tentu memiliki relevansi terhadap tujuan perusahaan yang bersifat *economic motive*; 3) kurangnya respon dari *stakeholder*; sehingga kurang terciptanya *social control*, meskipun masyarakat merupakan *social agent*; 4) dukungan tata perundangan yang masih lemah; 5) standar operasionalnya masih belum jelas; dan 6) belum adanya ukuran evaluasi yang jelas.⁶

Pengertian CSR telah banyak disampaikan oleh para pakar maupun lembaga sosial. Beberapa diantaranya adalah definisi dari McWilliams dan Siegel yang mendefinisikan CSR sebagai serangkaian tindakan perusahaan yang muncul untuk meningkatkan produk sosialnya, memperluas jangkauannya melebihi kepentingan ekonomi eksplisit perusahaan, dengan pertimbangan tindakan semacam ini tidak disyaratkan oleh peraturan hukum.⁷ Sementara Magnan dan Ferrel mengartikannya sebagai perilaku bisnis, dimana pengambilan keputusannya mempertimbangkan tanggungjawab sosial dan memberikan perhatian secara lebih seimbang terhadap kepentingan *stakeholders* yang beragam.⁸ Definisi CSR berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.⁹

⁶ Nor Hadi, 2011, *Corporate Sosial Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal.45.

⁷ Tirta N. Mursitama, M. Fadhil Hasan, dan Iman Y. Fakhruddin, 2011, *Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia: Teori dan Implementasinya*, (Jakarta: INDEF), hal.23.

⁸ *Ibid*, hal.23.

⁹ Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 74.

Menurut Philip Kotler, CSR dikatakan sebagai *discretionary* yang dalam arti luas berarti sesuatu yang perlu dilakukan, seandainya tidak dilakukan, akan berakibat merugikan diri sendiri. Menurut *World Business Council for Sustainable Development*, CSR bukan sekadar *discretionary*, tetapi suatu komitmen yang merupakan kebutuhan bagi perusahaan yang baik sebagai perbaikan kualitas hidup.¹⁰

Berdasarkan definisi tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa CSR merupakan suatu tindakan yang perlu untuk dilakukan oleh para pelaku bisnis, sebagai wujud kepedulian mereka terhadap lingkungan sosial dan masyarakat sekitar mereka, selain untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, yang dapat meningkatkan keuntungan ekonomi perusahaan. CSR perlu dilakukan oleh perusahaan, karena perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, oleh karenanya harus memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitarnya. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, maka perusahaan tidak akan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.

Prinsip-prinsip CSR dan Tujuan CSR

Crowther David mengurai prinsip-prinsip tanggungjawab sosial menjadi tiga, yaitu: (1) *sustainability*, (2) *accountability*, dan (3) *transparency*. *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktifitasnya, tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa mendatang dan kemampuan generasi mendatang. *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktifitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas diperlukan, ketika aktifitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. *Transparency*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi berhubungan dengan pelaporan aktifitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal.¹¹

Tujuan CSR diantaranya yaitu, *pertama*, perusahaan mesti menyadari

¹⁰ Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, dan Emir Wicaksana, 2011, *Panduan Lengkap Perencanaan Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Jakarta: Penebar Swadaya), hal. 15.

¹¹ Nor Hadi, 2011, *Corporate Sosial Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal.59.

bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang terkadang bersifat ekspansif atau eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyaman pada masyarakat.

Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan, mendongkrak citra dan performa perusahaan.

Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Konflik itu bisa berasal dari dampak operasional perusahaan atau akibat yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Manfaat CSR

Dalam artikelnya yang berjudul *Corporate Social Responsibility and Resource-Based Perspectives*, Branco and Rodrigues membagi dua manfaat CSR bila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dari sebuah perusahaan, yaitu dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, manfaat itu meliputi beberapa hal. Pertama, pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Serangkaian aktifitas pengembangan sumber daya manusia dicapai dengan menciptakan para karyawan yang memiliki ketrampilan tinggi. Karyawan yang berkualitas akan menyumbang pada sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif. Misalnya, dengan meningkatnya loyalitas dan moral dari karyawan.

Kedua, adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku, serta hubungan dengan supplier yang berjalan dengan baik. Muaranya adalah peningkatan performa lingkungan perusahaan. Adapun bentuk-bentuk aktifitas yang dapat dilakukan, antara lain penggunaan bahan baku yang didaur ulang atau dapat dipakai kembali

dan mengganti bahan baku produksi yang kurang ramah lingkungan.

Ketiga, menciptakan budaya perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia, dan organisasi yang baik. Pengenalan CSR diharapkan akan memunculkan komitmen karyawan yang kuat terhadap perusahaan dan kemauan untuk belajar. Selain itu, partisipasi para karyawan di dalam perusahaan dan ketrampilan mereka diharapkan dapat meningkat.

Keempat, meningkatnya kinerja keuangan, dimana dengan dilakukannya CSR, kinerja keuangan perusahaan, terutama harga saham bagi perusahaan yang telah go public, menjadi lebih baik. Misalnya, riset yang dilakukan oleh Al-Tuwaijri bersama kawan-kawan, yang menguji hubungan antara tiga variabel, yakni pengungkapan tanggungjawab terhadap lingkungan yang merupakan salah satu unsur CSR, kualitas lingkungan, dan kinerja ekonomi perusahaan pada 531 perusahaan yang terdaftar di Wall Street pada 1994, menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara ketiga variabel tersebut.¹²

Selain mendapatkan manfaat internal, terdapat beberapa manfaat eksternal dari penerapan CSR bagi suatu perusahaan. *Pertama*, penerapan CSR akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang mengemban dengan baik pertanggungjawaban secara sosial. Reputasi perusahaan yang baik akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Selain itu, juga akan meningkatkan ketertarikan investor kepada perusahaan tersebut, serta memperluas jaringan bisnis dan mengurangi risiko bisnis.

Kedua, CSR merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Artinya, sebuah produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan ramah lingkungan dan merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Untuk itu, diperlukan kesesuaian antara berbagai aktifitas sosial, dengan karakteristik perusahaan yang juga khas.

Ketiga, melaksanakan CSR dan membuka kegiatan CSR, merupakan instrumen untuk komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dengan adanya

¹² Tirta N. Mursitama, M. Fadhil Hasan, dan Iman Y. Fakhruddin, 2011, *Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia (Teori dan Implementasi)*, (Jakarta: INDEF), hal. 29.

komunikasi yang baik, maka perusahaan dapat membangun reputasi dan image yang baik.¹³

Peraturan Tentang CSR

Agar setiap pembangunan perekonomian nasional berjalan sebagaimana yang diharapkan, untuk itu perlu didukung oleh suatu produk perundang-undangan yang mengatur tentang badan usaha, di antaranya adalah Perseroan Terbatas (PT). Selama ini, ketentuan yang mengatur tentang PT adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagai pengganti peraturan perundang-undangan zaman Belanda yang diatur dalam Pasal 36-56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang berwenang untuk itu merespon dengan membuat Rancangan Undang-undang Perseroan Terbatas (RUUPT) sejak awal tahun 2000-an. Pada tanggal 20 Juli 2007, RUUPT disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Ketentuan mengenai CSR dalam UUPT di atur pada Pasal 74 yang berbunyi sebagai berikut:

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenal sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

¹³ *Ibid*, 31.

Akuntansi Sosial

Istilah Akuntansi Sosial (*Social Accounting*), sebenarnya bukan merupakan istilah baku dalam akuntansi. Para pakar akuntansi membuat istilah masing-masing, untuk menggambarkan transaksi antara perusahaan dengan lingkungannya. Ramanathan mempergunakan istilah *Social Accounting*, dan mendefinisikannya sebagai proses pemilihan variabel-variabel, yang menentukan tingkat prestasi sosial perusahaan, baik secara internal maupun eksternal.¹⁴ Lee D Parker menggunakan istilah *Social Responsibility Accounting*, yang merupakan cabang dari ilmu akuntansi.¹⁵ Sementara itu, Belkoui membuat suatu terminologi *Socio Economic Accounting* (SEA) yang berarti proses pengukuran, pengaturan dan pengungkapan dampak pertukaran antara perusahaan dengan lingkungannya.¹⁶

Berdasarkan beberapa uraian diatas, pada dasarnya definisi yang diberikan oleh para pakar akuntansi mengenai akuntansi sosial memiliki karakteristik yang sama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ramanathan, yaitu Akuntansi sosial berkaitan erat dengan masalah: 1) Penilaian dampak sosial dari kegiatan entitas bisnis, 2) mengukur kegiatan tersebut, 3) melaporkan tanggungjawab sosial perusahaan, dan 4) sistem informasi internal dan eksternal atas penilaian terhadap sumber-sumber daya perusahaan dan dampaknya secara sosial ekonomi.¹⁷ Ramanathan juga menguraikan tiga tujuan dari akuntansi sosial yaitu: 1) mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial neto periodik suatu perusahaan, yang meliputi bukan hanya manfaat dan biaya sosial yang di internalisasikan ke perusahaan, namun juga timbul dari eksternalitas yang mempengaruhi segmen-segmen sosial yang berbeda, 2) membantu menentukan apakah strategi dan praktik perusahaan

¹⁴ Arief Suadi, et.al, 1988, *Akuntansi Sosial: Implikasi dan Kemungkinan Pengembangan di Indonesia*, (Majalah Akuntansi No. 11 bulan Nopember).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Harahap Sofyan Safri, 1988, *Socio Economic Accounting (SEA): Menyoroti Etika dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Majalah Akuntansi No. 3 bulan Maret)

¹⁷ Arief Suadi, et.al, 1988, *Akuntansi Sosial: Implikasi dan Kemungkinan Pengembangan di Indonesia*, (Majalah Akuntansi No. 11 bulan Nopember).

yang secara langsung mempengaruhi relatifitas sumberdaya dan status individu, masyarakat dan segmen-segmen sosial adalah konsisten dengan prioritas sosial yang diberikan secara luas, pada satu pihak dan aspirasi individu pada pihak lain, 3) memberikan dengan cara yang optimal, kepada semua kelompok sosial, informasi yang relevan tentang tujuan, kebijakan, program, strategi dan kontribusi suatu perusahaan terhadap tujuan-tujuan sosial perusahaan.¹⁸

Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan terkait erat dengan sistem manajemen lingkungan (SML) dari suatu korporasi. *International Organization for Standardization* (ISO 14001) secara luas mendefinisikan bahwa, manajemen lingkungan menunjukkan tingkat respons korporasi terhadap isu-isu lingkungan, dalam menelaah posisi lingkungan korporasi, mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi untuk memperbaiki posisi tersebut, dan mengubah sistem-sistem manajemen untuk menjamin pembaharuan-pembaharuan dalam manajemen lingkungan yang efektif secara berkelanjutan. Sementara fungsi manajemen lingkungan antara lain: 1) telaah dan pengembangan kebijakan lingkungan; 2) pengembangan target-target dan sasaran-sasaran lingkungan; 3) penilaian siklus hidup produk; 4) kepatuhan terhadap regulasi; 5) penilaian dampak lingkungan; 6) minimalisasi sampah atau limbah; 7) program-program pencegahan polusi; 8) riset, pengembangan dan investasi dalam teknologi-teknologi yang ramah lingkungan; 9) pelaporan terhadap isu-isu dan kinerja lingkungan; 10) dan lainnya.¹⁹

Mengenai perlakuan akuntansi terhadap biaya lingkungan, kita dapat merujuk pada regulasi yang dikeluarkan The US Environment Protection Agency pada tahun 1995. Institusi ini memperkenalkan empat level pendekatan (*the four-tier*) untuk menghitung biaya lingkungan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Andreas Lako, 2011, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga), hal.123-124.

(*environmental cost*) dalam penilaian investasi. Tier 0 adalah *usual costs*, yaitu biaya-biaya langsung dan tidak langsung yang biasanya berkaitan dengan proyek investasi, misalnya kapital, penerimaan, material, dan lainnya. Tier 1 adalah *hidden costs*, yaitu biaya-biaya kewajiban kontingen yang timbul dalam kondisi-kondisi tertentu. Tier 3 adalah *less tangible costs* yaitu *costs* dan *benefits* kualitatif dari manajemen lingkungan yang diperbarui yang selanjutnya dinilai secara finansial, dan *gains*, dan *loss* dari *goodwill*, pemasok, pelanggan, karyawan, harga, biaya, pemasok, manajemen *image*, iklan dan lainnya.

Perlakuan akuntansi terhadap biaya lingkungan dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, pengorbanan sumber-sumber ekonomi untuk biaya lingkungan yang memiliki manfaat ekonomik bagi perusahaan untuk periode-periode selanjutnya harus diperlakukan sebagai pengeluaran investasi (aset) dan perlu diamortisasi ke periode-periode selanjutnya. Informasi tersebut harus dilaporkan dalam neraca (*balance sheet*).

Kedua, pengorbanan sumber-sumber ekonomi untuk biaya lingkungan yang tidak memiliki manfaat ekonomik bagi perusahaan untuk periode-periode selanjutnya harus diperlakukan sebagai pengeluaran beban (*expense*) periodik dan langsung dilaporkan dalam kelompok biaya umum dalam laporan laba-rugi. Rincian atas sejumlah informasi tersebut dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau dalam laporan tahunan perusahaan.

Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban mendasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung jawab atas prestasinya sendiri dan prestasi bawahannya. Konsep akuntansi pertanggungjawaban menjadi pedoman departemen akuntansi untuk mengumpulkan, mengukur dan melaporkan prestasi sesungguhnya, prestasi yang diharapkan dan selisih yang timbul dalam setiap pusat pertanggungjawaban. Definisi akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem akuntansi yang dirancang bagi sebuah organisasi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya dikumpulkan dan

dilaporkan sesuai dengan tingkat pertanggungjawaban dalam organisasi. Setiap tingkat pengawasan (*supervisory area*) dalam organisasi hanya dibebani dengan biaya yang menjadi tanggungjawab dan yang berada dibawah kendalinya.²⁰

Akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan dengan baik jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut:

Luas wewenang dan tanggung jawab pembuatan keputusan harus ditentukan dengan baik melalui struktur organisasi.

Manajer pusat pertanggungjawaban harus berperan serta dalam penentuan tujuan yang digunakan untuk mengukur prestasinya.

Manajer pusat pertanggungjawaban harus berusaha untuk mencapai tujuan yang ditentukan untuknya dan untuk pusat pertanggungjawabannya.

Manajer pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas kegiatan pusat pertanggungjawaban yang dapat dikendalikannya.

Hanya biaya, pendapatan, laba, dan investasi yang terkendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang harus dimasukkan ke dalam laporan prestasinya.

Laporan prestasi dan umpan baliknya untuk manajer pusat pertanggungjawaban harus disajikan tepat waktu.

Laporan prestasi harus menjadikan secara jelas selisih yang terjadi, tindakan koreksi, dan tindak lanjutnya sehingga memungkinkan diterapkannya prinsip pengecualian.

Harus ditentukan dengan jelas peranan prestasi manajemen terhadap struktur balas jasa atau perangsang dalam perusahaan.

Sistem akuntansi pertanggungjawaban hanya mengukur salah satu prestasi manajer pusat pertanggungjawaban, yaitu prestasi keuangan. Selain prestasi keuangan, seorang manajer dapat dinilai prestasinya atas dasar tingkat kepuasan karyawan, moral, dan sebagainya.

Sebelum sistem akuntansi pertanggungjawaban disusun, harus lebih dahulu dipelajari garis wewenang dan tanggung jawab pembuatan keputusan

²⁰ Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan, 1998, *Management Control System*, (Irwin : McGraw-Hill, Inc.)

sehingga dapat ditentukan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dirancang khusus sesuai dengan struktur organisasi untuk dapat menyajikan laporan-laporan prestasi yang berguna dalam menilai sumbangan manajer tingkat pertanggungjawaban tertentu dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab dalam hubungan dengan akuntansi pertanggungjawaban adalah :

Ukuran Perusahaan

Pada perusahaan dengan skala *middle-up* maka rentang tanggung jawab dari seorang manajer unit pertanggungjawaban akan semakin besar, hal ini disebabkan karena semakin besar skala perusahaan maka berpengaruh pada jumlah karyawan dan ruang lingkup kegiatan operasi perusahaan semakin besar pula, demikian pula sebaliknya dalam perusahaan dengan skala kecil maka rentang tanggung jawab manajer juga lebih sedikit karena jumlah karyawan dan ruang lingkup kegiatannya juga relatif kecil.

Karakteristik Kegiatan Operasi

Perusahaan menurut karakteristik kegiatan operasi pada umumnya dapat dibedakan menjadi perusahaan manufaktur, perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Tanggung jawab pada masing-masing karakteristik kegiatan operasi perusahaan juga berbeda-beda, sebagai contoh : bentuk tanggung jawab pada perusahaan manufaktur biasanya sesuai dengan produk yang dihasilkan sedangkan pada perusahaan jasa bentuk tanggung jawabnya akan disesuaikan dengan kemampuan penghasilan jasa dalam memuaskan kebutuhan dari klien.

Filosofi Manajer Tingkat Atas

Filosofi pengendalian manajer tingkat atas dihubungkan dengan persepsinya terhadap manajer bawahannya dapat dibagi menjadi pengendalian sifat *loose* (longgar) atau *tight* (ketat). Hal ini akan berpengaruh pada tanggung jawab pada organisasinya. Sebagai contoh: pada perusahaan dengan sifat pengendalian *loose* maka tanggung jawab dari organisasi akan diperlonggar sejauh hal tersebut sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi,

demikian pula sebaliknya.²¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif. Format penelitian kuantitatif dalam ilmu sosial, tergantung pada permasalahan dan tujuan penelitian itu sendiri. Pada penelitian kuantitatif, teori atau paradigma teori digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah penelitian, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi, dan menemukan alat-alat analisis data.²²

Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis data adalah cara atau langkah-langkah untuk mengolah data primer maupun data sekunder, yang bermanfaat bagi penelitian, guna mencapai tujuan akhir penelitian. Proses teknik analisa ini adalah dengan membandingkan data yang diperoleh dari perusahaan dengan landasan teori. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk melihat kesesuaian antara penerapan ketentuan yang ada. Melalui teknik ini akan dapat ditarik kesimpulan dan juga bila perlu dapat dikemukakan saran-saran yang dapat membantu dalam perbaikan.

HASIL PENELITIAN

Akuntansi CSR merupakan perluasan dari akuntansi sosial dan akuntansi lingkungan. Meskipun berbeda istilah, namun esensinya hampir sama. Gray *et al.* mendefinisikan akuntansi sosial sebagai proses pengkomunikasian dampak-dampak sosial dan lingkungan dari tindakan-

²¹ Dominiak dan Louderback, 1997, *Managerial Accounting*, (South Wesrtern College: International Thomson Publishing).

²² Burhan Bungin, 2010, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 35.

tindakan ekonomi perusahaan untuk kelompok-kelompok kepentingan tertentu dalam masyarakat. Sementara Elkington berpendapat bahwa akuntansi sosial bertujuan menilai dampak-dampak dari suatu korporasi terhadap masyarakat, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Karena itu, ruang lingkup akuntansi sosial mencakup: 1) identifikasi sasaran dan nilai-nilai sosial perusahaan; 2) identifikasi siapa saja stakeholder perusahaan; 3) menentukan indikator untuk mengukur kinerja sosial dan target-target yang mau dicapai; 4) mengukur kinerja, melakukan pencatatan, dan mempersiapkan akun-akun (accounts) dengan menggunakan prinsip kualitatif akuntansi seperti relevansi, reliabilitas, understandability, objektivitas dan konsistensi; 5) mencatat opini stakeholder agar bisa menyajikan baseline komparasi di masa depan; 6) menyertakan accounts dalam audit independen; dan 7) mempublikasikan accounts dalam pelaporan keuangan.²³

Definisi akuntansi lingkungan diungkapkan oleh Schaltegger et al., Schaltegger mendefinisikan akuntansi lingkungan sebagai sub area dalam akuntansi yang berhubungan dengan aktifitas, metode dan sistem pencatatan, analisis, dan pelaporan informasi lingkungan terkait dengan dampak-dampak finansial dan ekologis dari suatu sistem ekonomi korporasi. Menurut Gray dan Bebbington, ruang lingkup akuntansi lingkungan mencakup: 1) pertanggungjawaban kewajiban dan risiko kontinjen; 2) pertanggungjawaban atas revaluasi aset dan proyeksi modal; 3) analisis biaya dalam area-area penting seperti energi, limbah dan proteksi lingkungan; 4) pengembangan sistem akuntansi dan sistem informasi baru yang melingkupi semua area performa lingkungan; 5) menilai *costs* dan *benefits* dari program-program lingkungan; 6) pengembangan teknik-teknik akuntansi yang dapat mengungkap nilai aset, kewajiban dan ekuitas dalam terminologi ekologi.²⁴

Bila digabungkan, esensi akuntansi CSR adalah suatu proses pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan informasi terkait efek-efek sosial dan lingkungan dari tindakan-tindakan ekonomi perusahaan bagi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat atau yang menjadi

²³ Andreas Lako, 2011, *Dekonstruksi CSR* hal.119.

²⁴ *Ibid*, hal.120.

stakeholder perusahaan. Ada dua dimensi utama dalam akuntansi CSR, pertama, melaporkan dan mengungkap *costs* dan *benefits* dari aktifitas ekonomi perusahaan yang secara langsung berdampak pada profitabilitas *bottom-line*, dimana *costs* dan *benefits* tersebut bisa dihitung secara akuntansi. Kedua, melaporkan *costs* dan *benefits* dari aktifitas ekonomi perusahaan yang berdampak langsung pada individu, masyarakat dan lingkungan.

PEMBAHASAN

Perlakuan Akuntansi CSR

Perlakuan akuntansi terhadap pengorbanan aset-aset (sumberdaya) ekonomik, belum diatur dalam Undang-undang. Undang-undang yang ada, yaitu UU No. 23/1997 tentang Lingkungan Hidup belum mengaturnya. Selain itu, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejak edisi 1994 hingga 2004, juga belum mengaturnya. Hal tersebut, mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan dalam mengakui, mencatat dan melaporkan informasi tentang pengorbanan aset-aset ekonomik untuk tanggungjawab lingkungan dalam laporan keuangan, dan juga mengakibatkan perusahaan, kesulitan dalam mengungkapkan (*disclosure*) informasi biaya tanggungjawab lingkungan, kepada otoritas dan *stakeholders*.

Berbeda dengan pengorbanan aset-aset ekonomi untuk biaya produksi dan biaya operasional, pengorbanan sejumlah aset ekonomik perusahaan untuk biaya Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memiliki karakteristik unik. Di satu sisi, pengorbanan yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan lingkungan tersebut diwajibkan oleh otoritas (Meneg LH) secara periodik sehingga beban periodik bagi perusahaan. Karena merupakan beban periodik, maka perlakuan akuntansi terhadap pengorbanan tersebut adalah sebagai biaya atau beban umum sehingga dicatat pada kelompok biaya administrasi dan umum laporan laba-rugi.

Namun di sisi lain, pengorbanan untuk biaya TJSL tersebut merupakan pengeluaran investasi, karena dari pengorbanan tersebut, perusahaan akan mendapatkan sejumlah manfaat sosial dan ekonomi atau keuntungan di

waktu-waktu mendatang. Namun, hal itu sulit dilakukan, karena pengeluaran untuk biaya TJSL harus terus dilakukan, dan dilaporkan perusahaan secara periodik, agar peringkat kinerjanya terus membaik. Karena itu, perlakuan akuntansi yang layak, terhadap pengorbanan aset-aset ekonomik untuk biaya TJSL, adalah sebagai biaya periodik dengan nama account: biaya tanggungjawab sosial dan lingkungan (*social & environmental responsibility costs*). Biaya tersebut disajikan dalam item biaya operasional, khususnya pada biaya umum operasional.

Pelaporan dan Pengungkapan CSR

Seperti halnya perlakuan akuntansi CSR, standar pelaporan dan pengungkapan CSR-pun, belum ada regulasi ataupun standar akuntansi yang mengaturnya. Oleh karena itu, bentuk dari laporan CSR di tiap perusahaan, tidak selalu sama, atau bahkan berbeda sama sekali, tergantung dengan kebutuhan mereka. Dalam setahun terakhir, permintaan dari Meneg Lingkungan Hidup (pemerintah), LSM lingkungan dan publik agar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) perlu segera menerbitkan Standar Akuntansi Lingkungan semakin gencar. Sebagai respon terhadap permintaan tersebut, konon saat ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI sedang mempelajari secara serius kerangka konseptual akuntansi lingkungan dan mempersiapkan untuk penyusunan draft Standar Akuntansi Lingkungan (SAL).

Penetapan Standar Akuntansi Lingkungan sangatlah penting, mengingat selama beberapa dekade terakhir, masalah lingkungan telah menjadi problema nasional yang serius dan kronis. Selama ini sering mencuat ke publik masalah-masalah seperti tidak adanya tolok ukur yang jelas untuk menilai aset lingkungan dan sumberdaya alam, tidak tercatatnya nilai aset lingkungan dan sumberdaya alam dalam neraca keuangan negara (APBN), sulit menghitung nilai kerusakan dan degradasi lingkungan akibat ulah industri, dan tidak adanya pertanggungjawaban publik, atau transparansi dari pemerintah dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan. Namun,

masalah-masalah tersebut terus berputar dari waktu ke waktu tanpa ada solusi yang tepat dan komprehensif untuk mengatasinya. Karena itu, pemerintah stakeholders agar IAI segera memiliki suatu SAL yang komprehensif, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

PENUTUP

Akuntansi CSR sangat penting bagi lembaga keuangan syariah, khususnya bank umum syariah. Adanya dana kebajikan dalam laporan keuangan Bank Syariah, mewajibkan bank syariah untuk melaporkan penggunaan dana tersebut secara mendetail. Namun, Akuntansi CSR pada bank syariah belum memiliki standar khusus dalam hal pelaporan dan pengungkapannya, sehingga laporan CSR yang dilaporkan oleh bank-bank syariah masih menggunakan standar mereka masing-masing. Bahkan beberapa bank belum menerbitkan laporan CSR perusahaan mereka. Setiap pengeluaran yang mereka gunakan untuk kegiatan sosial hanya dicatat secara sederhana tanpa ada bentuk laporan khusus. Penulis mengharapkan adanya standar akuntansi CSR untuk Bank Syariah, sehingga nantinya Laporan CSR bank-bank syariah di Indonesia memiliki keseragaman dalam penyusunannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adham, Ifan Noor. *Tanggung Jawab Sosial Bank Islami: Teori dan Praktik*. Cetakan I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- Ambadar, Jackie. *CSR dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia. 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Cetakan Ke-4. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2006.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana. 2008.
- Hadi, Nor. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Karim, Adiwarmam A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. . 2007.
- Kotler, Philip, Nancy Lee. *Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good For Your Company and Your Cause*. New Jersey: John Wiley & Sons. 2005.
- Lako, Andreas. *Dekontruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011.
- Lewis, Mervyn K dan Latifa M. Algaoud. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Cetakan I. Jakarta: Serambi. . 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPPAMP YKPN. 2005.
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Cetakan I. Yogyakarta: P3EI . 2008.
- Mursitama, Tirta N.,M. Fadhil Hasan, dan Iman Y. Fakhrudin. *Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Cetakan I. Jakarta: INDEF. 2011.
- Prides, Tim Manajemen. *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2008.
- Rachman, Nurdizal Z., Asep Efendi, dan Emir Wicaksana. *Panduan Lengkap*

- Pelaksanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2011.
- Rahmatullah, Trianita Kurniati. *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Reponsibility)*. Yogyakarta: Samudra Biru. 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Kreatama. 2005.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Edisi Revisi)*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Wahyudi, Isa, dan Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Cetakan I. Malang: In-Trans Publishing. 2008.
- Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PPSI*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Grasindo. 2006.
- Yuliusman. "Akuntansi Lingkungan: Meningkatkan Keunggulan Kompetitif dan Mendorong Investasi". dalam *Percikan*: Vol. 91 Edisi Agustus. 2008.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Zikrul Hakim. 2007.
- . *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- . *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia. 2003.

Nurul Fitri Ismayanti: *Akuntansi Corporate Social.....*